

**FORMULIR
PERMOHONAN BARU**

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Di Jakarta

Perihal : **PERMOHONAN IZIN MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN
PAJAK**

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Tempat / tanggal lahir :(2).....
Pendidikan Terakhir :(3).....
Alamat Rumah :(4).....
Nomor Telepon/HP :(5).....
No. Kartu Tanda Penduduk :(6).....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :(7).....

Dengan ini mengajukan permohonan izin menjadi kuasa hukum pada
Pengadilan Pajak. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya
lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
3. Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang, diantaranya:
 - a. Fotokopi ijazah/sertifikat brevet pajak atau keahlian di bidang Kepabeanan/Cukai dari instansi/lembaga yang terakreditasi;
 - b. Fotokopi ijazah Sarjana di Bidang Administrasi Fiskal atau Diploma III (tiga) Pajak/Kepabeanan dan Cukai dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dalam menyelenggarakan pendidikan; atau
 - c. Fotokopi surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku untuk yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak.

6. Pas photo terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan
8. Asli Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Demikian disampaikan agar maklum.

.....(8).....,.....(9).....

Pemohon

(10)

(.....(11).....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi nama orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (3) : Diisi pendidikan terakhir orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (4) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (5) : Diisi nomor telepon orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (6) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (8) : Diisi nama kota tempat formulir permohonan dibuat
- Nomor (9) : Diisi tanggal formulir permohonan dibuat
- Nomor (10) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (11) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

FORMULIR
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap :(1).....
Tempat/tanggal lahir :(2).....
Alamat Rumah :(3).....
.....
.....
Nomor Kartu Tanda Penduduk WNI :(4).....
Pendidikan Formal :1.(5).....
(Cantumkan Tahun Lulus 2.
dan Nama Pendidikannya) 3.
4.
5.
6.

Nomor Izin Konsultan Pajak :(6).....
.....
Pendidikan Brevet/PPJK :(7).....
(Cantumkan jenis Brevet/
Sertifikat, nomor, bulan dan tahun,
serta Lembaga yang menerbitkan
brevet/sertifikat
.....

Pekerjaan :(8).....
.....

Pengalaman Kerja :(9).....
.....
.....
.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(10).....,.....(11).....

(12)

(.....(13).....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DARTAR RIWAYAT HIDUP

- Nomor (1) : Diisi nama orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (3) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (4) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (5) : Diisi riwayat pendidikan formal orang perseorangan yang mengajukan permohonan dengan menyebutkan tahun lulus dan nama pendidikannya
- Nomor (6) : Diisi nomor izin konsultan pajak
- Nomor (7) : Diisi jenis Brevet/Sertifikat, nomor sertifikat, bulan dan tahun terbit sertifikat, serta lembaga yang menerbitkan brevet/sertifikat
- Nomor (8) : Diisi pekerjaan terakhir orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (9) : Diisi riwayat pengalaman kerja orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (10) : Diisi nama kota tempat formulir Daftar Riwayat Hidup dibuat
- Nomor (11) : Diisi tanggal Daftar Riwayat Hidup dibuat
- Nomor (12) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (13) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dengan ini menyatakan untuk berkomitmen bahwa saya:

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi dan Kolusi;
- 2. Dalam menjalankan tugas sebagai Kuasa Hukum, berjanji akan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya;
- 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam komitmen Kuasa Hukum ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan komitmen Kuasa Hukum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(1).....,.....(2).....



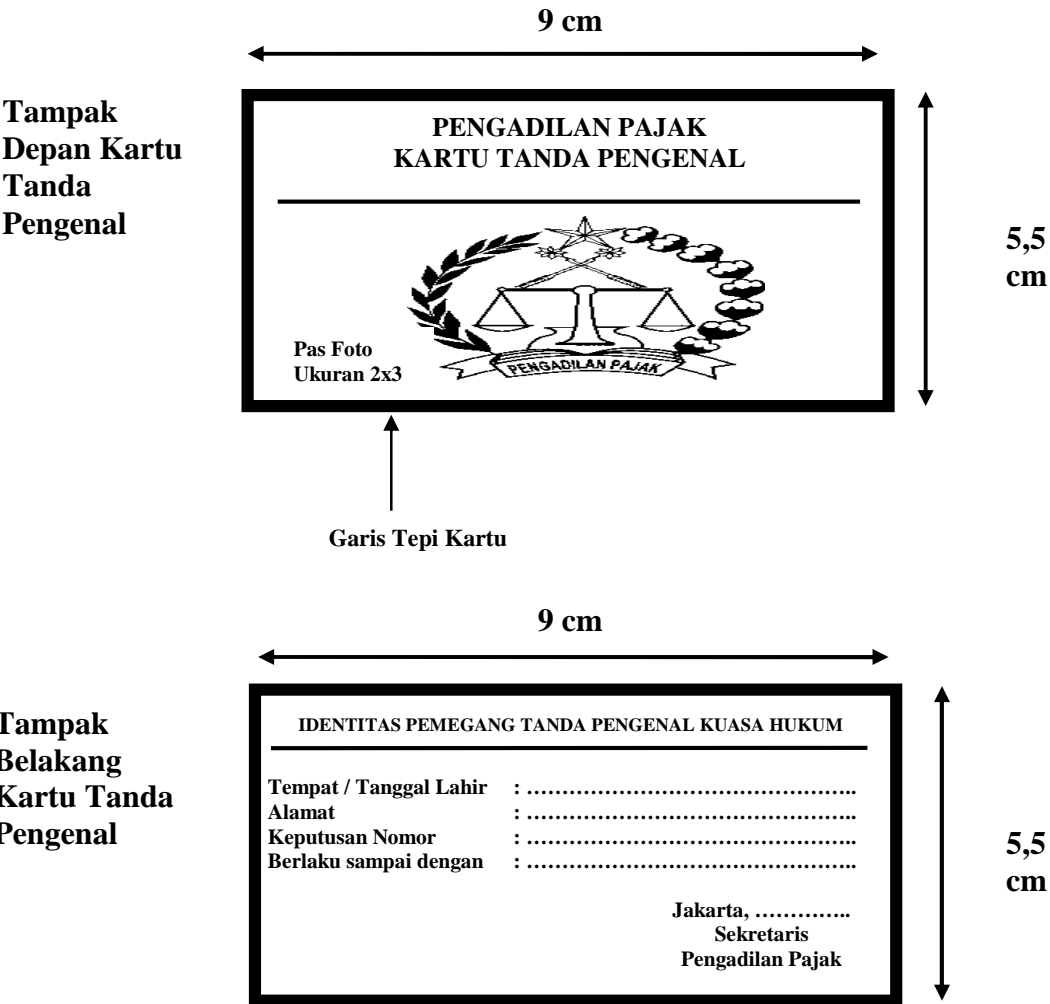
(.....(4).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi nama kota tempat surat pernyataan dibuat
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat pernyataan dibuat
- Nomor (3) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (4) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



Keterangan Gambar Kartu Tanda Pengenal (Kartu):

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Pas photo | : | Ukuran 2 X 3 cm (hitam putih atau berwarna). |
| Warna tulisan pada kartu | : | warna hitam. |
| Alamat | : | Sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP pemohon. |
| Keputusan Nomor | : | Diisi sesuai dengan nomor Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang berlaku. |
| Berlaku sampai dengan | : | Diisi sesuai dengan jangka waktu masa berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku. |
| Ukuran kartu | : | Panjang 9 (sembilan) cm x lebar 5,5 (lima koma lima) cm |
| Logo/lambang | : | Logo/lambang Pengadilan Pajak hanya tergambar ditengah permukaan Kartu Tanda Pengenal (tidak tergambar pada belakang Kartu Tanda Pengenal) |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

FORMULIR
PERMOHONAN PERPANJANGAN

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Di Jakarta

Perihal : **PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN MENJADI KUASA HUKUM PADA
PENGADILAN PAJAK**

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Tempat / tanggal lahir :(2).....
Pendidikan Terakhir :(3).....
Alamat Rumah :(4).....
Nomor Telepon/HP :(5).....
No. Kartu Tanda Penduduk :(6).....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :(7).....

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang terakhir;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Fotocopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
6. Pas photo terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Demikian disampaikan agar maklum.

.....(8).....,.....(9).....

Pemohon

(10)

(.....(11).....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN

- Nomor (1) : Diisi nama orang perserorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perserorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (3) : Diisi pendidikan terakhir orang perserorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (4) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (5) : Diisi nomor telepon orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (6) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (8) : Diisi nama kota tempat formulir permohonan perpanjangan dibuat
- Nomor (9) : Diisi tanggal formulir permohonan perpanjangan dibuat
- Nomor (10) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (11) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO